



## Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Subsidi Meteran Listrik Pasang Baru Di Desa Semembang Kecamatan Durai

Doni Septian<sup>1</sup> , Yozi Rahmadeni<sup>2</sup> 

<sup>1</sup> Program Studi Akuntansi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

<sup>2</sup> Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Dosen Sosiologi Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

corresponding author: [doni.septian@stainkepri.ac.id](mailto:doni.septian@stainkepri.ac.id)

**Kata Kunci:**  
Efektivitas;  
Meteran Listrik;  
Subsidi;

**Abstrak:** Program bantuan subsidi meteran listrik pasang baru per rumah tangga dengan daya 4 a (900va) Di Desa Semembang Kecamatan Durai untuk membantu meringankan beban masyarakat khususnya lansia dan tidak mampu. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat dan menganalisa secara mendalam terkait efektivitas pelaksanaan program bantuan subsidi meteran listrik pasang baru per rumah tangga dengan daya 4A (900va) yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM di Provinsi Kepulauan Riau. Konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep efektivitas oleh Zakiah dkk dengan menggunakan 3 indikator: (pencapaian tujuan, integrasi komunikasi dan adaptasi). Untuk dapat menjawab persoalan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program bantuan subsidi meteran listrik pasang baru per rumah tangga dengan daya 4 a (900va) Di Desa Semembang Kecamatan Durai diukur dari 3 indikator tersebut, belum terlaksana dengan efektif sebagaimana mestinya yang diharapkan.

### PENDAHULUAN

Akses listrik merupakan prasyarat bagi suatu negara untuk mencapai pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Listrik yang memadai memberikan peluang bagi orang untuk menjadi produktif dan bekerja lebih efisien serta memungkinkan mereka untuk kemajuan sosial dan ekonomi. Kemajuan sosial dan ekonomi yang terjadi akan mendorong kebutuhan listrik yang lebih berkualitas. Negara harus menyediakan akses listrik untuk kelompok masyarakat miskin di desa serta daerah tertinggal. Akses pelayanan listrik yang cukup, berkualitas dan terjangkau harus dilakukan Pemerintah melalui penyediaan dana untuk membangun infrastruktur listrik serta pengaturan harga listrik dan pemberian subsidi bagi masyarakat miskin di desa, sehingga listrik dapat dijangkau oleh masyarakat di daerah perdesaan, khususnya daerah-daerah yang tertinggal, terbelakang dan terpencil, (Mursanti & Tumiwa, 2019)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa listrik dapat diakses oleh semua orang dan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kekuasaan untuk mengaturnya. Penyediaan listrik harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan. Untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang efisien, hemat biaya dan berkelanjutan, maka

penyediaan tenaga listrik dan infrastruktur pendukungnya perlu direncanakan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ada.

Mendukung tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan tujuan pembangunan daerah dalam penyediaan tenaga listrik, terutama pada kelompok masyarakat tidak mampu, daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, pulau terpencil serta pulau di perbatasan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengatur melalui Peraturan Daerah No 5 Tahun 2017 Tentang Ketenagalistrikan. Dipaparkan pada Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3) bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran untuk menekan kenaikan rasio elektrifikasi pedesaan di daerah lewat pembangunan infrastruktur tenaga listrik dan bisa difasilitasi oleh Pemerintah Daerah lewat pembiayaan yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan yang lain yang legal dan tidak mengikat.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada bulan September 2021 yang lalu, memberikan bantuan subsidi meteran listrik pasang baru per rumah tangga dengan daya 4 A (900va) di Pulau Semembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun. Program ini sebagaimana merupakan usulan permohonan dari Pemerintah Desa Semembang sejak bulan juli 2021. Desa Semembang ini merupakan salah satu desa terpencil yang berada di Kecamatan Durai Karimun yang belum mendapatkan sentuhan akses listrik dari PLN sejak puluhan tahun silam, dan baru pada bulan juli 2021 mendapatkan akses pembangunan infrastruktur listrik dari PLN.

Program ini dalam pelaksanaan pendistribusiannya muncul sebuah permasalahan, dimana terjadinya ketidaksesuaian antara data rumah tangga tak mampu yang layak sebagai penerima yang di usulkan Desa dengan data realisasi yang menerima ketika pelaksanaan pendistribusian bantuan yang dilaksanakan oleh Biro. Banyak data nama-nama rumah tangga sebagai calon penerima yang telah di data dan yang layak untuk menerima, namun tidak mendapatkan, dan yang mendapatkan malahan sebaliknya, sehingga menimbulkan dinamika dan konflik di tengah masyarakat.

Efektivitas diartikan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan seberapa baik suatu tujuan dapat dicapai. Efektivitas program dapat diamati dalam hal menentukan pilihan, waktu, tujuan, dan sasaran. Oleh karena itu, perlu diukur efektivitasnya, karena efektivitas bantuan subsidi untuk meteran listrik 4 A (900va) yang baru dipasang per rumah tangga di Desa Semembang akan dilihat kemudian. (Zakiah et al., 2020)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: efektivitas pelaksanaan program bantuan subsidi meteran listrik pasang baru di Desa Semembang dan pihak-pihak yang terlibat. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat dan menganalisa secara mendalam efektivitas pelaksanaan program bantuan subsidi meteran listrik pasang baru per rumah tangga dengan daya 4A (900va) yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM di Provinsi Kepulauan Riau, serta untuk menggambarkan efektivitas komunikasi antara Pemerintah Provinsi dan Desa dalam pelaksanaan program bantuan subsidi.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang terjadi pada saat pelaksanaan, kemudian mendeskripsikan fakta-fakta dan keadaan dari objek penelitian yang sesuai dengan kenyataan riil serta mencoba menganalisa untuk memberikan kebenaran-nya berdasarkan data yang diperoleh. (Irwandi, 2017). Penelitian ini, terdiri dari 2 (dua) sumber data, yakni: data primer dan sekunder. Data primer penelitian ini memuat data yang berasal dari sumber pertama yakni:

1. Amran, Sebagai Kepala Desa Semembang
2. Kepala Bidang Listrik Dinas ESDM Provinsi Kepri
3. Anggota DPRD Provinsi Kepri Dapil Karimun
4. M. Zaki Yamani, Sebagai Tokoh Masyarakat
5. Biro Pelaksana Bantuan Subsidi meteran listrik pasang baru
6. Hendriko, Sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa
7. Ikmal Wahyudi, Sebagai Staf dan warga Desa Semembang

Sedangkan untuk data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, artikel, Peraturan Perundangan-Undangan, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. (Zakiyah et al., 2020). Pengumpulan data penelitian ini penulis menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian dan verifikasi data. Setelah data terkumpul maka data dianalisis secara analisis deduktif yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menganalisa teori Efektivitas sebagai landasan adanya analisis. Dalam hal itu dilakukan dengan cara menganalisis keefektifan pelaksanaan bantuan subsidi meteran listrik pasang baru di Desa Semembang Kecamatan Durai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Infrastruktur Listrik Desa Semembang

Semembang merupakan salah satu Desa dari 4 (empat) Desa terpencil perbatasan yang berada di Kecamatan Durai Karimun Kepulauan Riau, yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Kateman Provinsi Riau. Desa tersebut belum pernah mendapatkan akses listrik dari PLN, pernah dibantu dari Pemerintah Kabupaten Karimun melalui *engine* diesel, namun tidak bertahan lama dikarenakan *engine* tersebut *overcapacity* atau tidak mampu menampung beban daya yang tinggi akibat dari perkembangan dan penambahan jumlah penduduk rumah tangga Semembang yang terus meningkat.

Sejak itu, hingga pada tahun 2021 aktivitas masyarakat di Semembang sehari-hari dalam menunjang perekonomian keluarga, pendidikan, keagamaan, bekerja dan sebagainya hanya menggunakan lampu pelita dan menggunakan mesin engkol bagi rumah tangga yang mampu. Mengingat ketidaksiwaan dan minimnya perhatian Pemerintah Kabupaten dan Provinsi dalam menyelesaikan persoalan listrik di Semembang. Pada tahun 2018 Kepala Desa bersama salah seorang pemuda Semembang yang berada di Tanjungpinang mengajukan permohonan pembangunan infrastruktur listrik ke direktur PLN yang berada di Tanjungpinang, dan pada tahun 2019 Desa Semembang mendapatkan bantuan infrastruktur listrik berupa bangunan Gedung rumah untuk ditempatkan *engine* dan rumah kontrol untuk operator yang bertugas.

Pada tahun 2020, salah seorang Pemuda dari Desa tersebut, melakukan hearing bersama pemangku kebijakan di PLN, di dapati kesepakatan bahwa PLN menjanjikan program listrik Desa semembang akan mendapatkan relokasi *engine* dari bangka Belitung pada bulan November 2020. Namun setelah waktu yang dijanjikan, *engine* tersebut tidak kunjung tiba dan bergeser ke salah satu Desa lain, yakni: Desa Buluh Patah yang berada di Kecamatan Moro. Padahal secara infrastruktur bangunan, lebih dahulu dibangun di Desa Semembang daripada Desa Buluh Patah. Pemuda Desa tersebut mempertanyakan ke pihak PLN, DPRD Provinsi Dapil Karimun, dan Dinas ESDM, tidak ada satupun kejelasan jawaban kepastian dari pemangku kebijakan tersebut. Pada saat itu Indonesia dilanda pandemic covid-19 yang berdampak pada refocusing anggaran pada PLN, Pemuda Desa bersama Kepala Desa dan BPD melakukan hearing kembali bersama pemangku kebijakan di PLN mempertanyakan kapan kepastian realisasi *engine* yang telah disepakati sebelumnya, di dapati titik temu, sehingga pada bulan juli 2021 desa tersebut mendapatkan harapan yang ditunggu-tunggu masyarakat, yakni infrastruktur *engine* dengan kapasitas 100 Kwh untuk beroperasi di Semembang yang direlokasi dari pulau Keridik Kecamatan Moro.

### Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Subsidi Meteran Listrik Pasang Baru Per Rumah Tangga Dengan Daya 4 A (900va) oleh Dinas ESDM Provinsi Kepri Di Desa Semembang Kecamatan Durai

Program bantuan subsidi meteran listrik pasang baru per rumah tangga dengan daya 4 A (900va) di Pulau Semembang Kecamatan Durai yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau sejak pada tanggal 26 September 2021, namun disaat peresmian yang dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Riau pada tanggal 27 Oktober 2021, program ini baru terealisasi 20%, dan baru terealisasi 100% pada tanggal 30 November 2021. Program

ini merupakan program usulan permohonan dari Pemerintah Desa Semembang yang diajukan sejak tanggal 28 Juli 2021 kepada Gubernur Kepulauan Riau tembusan ke Dinas ESDM.

Permohonan usulan ini sebagaimana yang dikatakan Kepala Desa Semembang adalah upaya dari Pemerintah Desa Semembang untuk meringankan beban masyarakat, terutama untuk masyarakat miskin dan lansia di Semembang yang dianggap tidak mampu secara ekonomi, setelah berliku-liku perjuangan Desa Semembang mendapatkan infrastruktur bangunan berupa Gedung dan engine untuk beroperasi melakukan penerangan listrik yang dilaksanakan oleh PLN.

Pada dasarnya dengan adanya program bantuan subsidi seperti ini merupakan suatu langkah yang efektif yang diambil oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas ESDM Provinsi Kepri yang mana berperan sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakatnya melalui kerjasama lembaga-lembaga yang terkait. (Tutdin et al., 2021). Suatu program, khususnya program bantuan sosial yang langsung menyasar masyarakat yang membutuhkan, pasti memiliki kekurangan dalam proses pelaksanaannya. Untuk itu, diperlukan sebuah pengukuran efektivitas suatu program, agar program tersebut menjadi lebih baik. Keberhasilan efektivitas tercermin dari tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, dan efektivitas akan semakin tinggi jika hasil program atau kegiatan semakin mendekati tujuan. (Hariningsih, 2021)

Tingkat efektivitas suatu program dapat diukur dari perspektif yang berbeda, tergantung pada bagaimana hal itu dinilai dan ditafsirkan. Jika suatu program dan tujuan tidak sesuai dengan harapan, maka dapat dikatakan bahwa program tersebut belum efektif. Ukuran efektivitas program diperlukan tiga indikator, diantaranya: (Zakiyah et al., 2020)

1. Pencapaian tujuan, yaitu segala bentuk usaha untuk mencapainya, harus dipandang sebagai suatu proses. Ada dua faktor, kerangka waktu dan tujuan yang merupakan tujuan sebenarnya.
2. Integrasi komunikasi, yang mengukur perkembangan tingkat dan konsekuensi dari kemampuan organisasi untuk bersosialisasi atau berkomunikasi. Integrasi melibatkan proses komunikasi dan sosialisasi.
3. Adaptasi, kemampuan suatu organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya, dan prosedur terkait dengan kesesuaian untuk kondisi lokasi.

Berlandaskan konsep efektivitas tersebut, dianalisa bahwa efektivitas pelaksanaan program bantuan subsidi meteran listrik pasang baru per rumah tangga dengan daya 4 A (900va) di Desa Semembang oleh Dinas ESDM Provinsi Kepri ini belum terealisasi secara efektif, diantaranya:

#### **1. Pencapaian Tujuan Program Bantuan Subsidi Meteran Listrik Pasang Baru Per Rumah Tangga Dengan Daya 4 A (900va) Oleh Dinas ESDM Provinsi Kepri Di Desa Semembang**

Program ini pada awalnya memang belum ada di perencanaan anggaran tahun berjalan di Dinas ESDM Provinsi Kepri, karena usulan permohonan masuknya di pertengahan tahun 2021 yang diusulkan oleh Desa dan tentunya baru bisa dilaksanakan pada tahun 2022. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi covid-19 yang melanda, semua anggaran dialihkan dan di prioritaskan ke BST dan BLT. Namun setidaknya, jika berkaca dari Undang-Undang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi tentang Ketenagalistrikan, secara tegas Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk membangun infrastruktur listrik serta pengaturan harga listrik dan pemberian subsidi bagi masyarakat miskin di desa.

Dinas ESDM Provinsi Kepri dalam hal ini, berdasarkan hasil diskusi wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Bidang Listrik, sebagaimana dikatakannya bahwa "Dinas ESDM mengupayakan melakukan pencapaian tujuan program dengan waktu hingga akhir tahun 2021, walaupun pada prinsipnya program ini belum ada di perencanaan, namun kami Dinas ESDM setidaknya dapat menyelesaikan program bantuan ini selama 3 bulan, dari September hingga November 2021, dengan mencari revisi sisa anggaran kegiatan Dinas

kami serta mencari solusi melalui anggaran pokok Dewan untuk melaksanakan program bantuan ini pada tahap pertama, dan anggaran CSR Perusahaan pada tahap kedua”.

Terkait proses pelaksanaan program, dijelaskannya bahwa dalam pelaksanaan kami melimpahkan kepada biro yang melakukan kerjasama dengan kami, dan kami menyerahkan langsung kepada Biro untuk melakukan koordinasi dan komunikasi ke Desa. Dari usulan permohonan Desa yang masuk ke kami berjumlah lebih kurang 192 KK, namun dapat kami inisiasi pada tahap pertama yakni: 75 KK, sisanya kami mengupayakan pada tahap 2 tahun 2022. dikarenakan kondisi keuangan kami setelah terjadinya refocusing anggaran”.

Di samping itu penulis menanyakan bagaimana realisasi program pada tahap pertama dilapangan, beliau menjawab “untuk realisasi dari tahap pertama waktu itu, kami mengalami dilema yang luar biasa, dimana pada tanggal 27 oktober 2021 pak Gubernur turun melakukan peresmian, namun untuk keuangan Pemerintah kita tau sama tau masih dalam proses tahap pencairan, dan pihak Biro terkendala biaya untuk mendahulukan, sehingga waktu itu disaat peresmian baru bisa terealisasi 20 an persen, hanya 20 kk rumah tangga yang terpasang.

Penulis kembali menanyakan, bagaimana dengan sisa tahap pertama yang belum terpasang, Kembali ditegaskannya mengatakan “untuk sisanya kami menunggu proses pencairan, dan berupaya mencari kerjasama anggaran dari CSR perusahaan. Dilema kami waktu itu menghadapi masyarakat disana, dimana masyarakatnya kita sama tau, apalagi terkait bantuan, jika itu belum terwujud keseluruhan, maka kita harus siap mendengar nyanyian dari mereka. Ditambah dengan terjadinya miskomunikasi dari Biro dengan Kepala Desa yang menimbulkan ketidaksesuaian data penerima dari yang diusulkan Desa, dengan nama-nama yang akan direalisasi tahap pertama berjumlah 75 KK. Untuk meredam itu, saya mencoba menghubungi salah satu pemuda desa yang sebelumnya bertemu dan membantu saya dalam mensukseskan program ini, dialah yang membantu melakukan komunikasi ke Kepala Desa dan tokoh masyarakat disana untuk meminimalisir kekeliruan dan kekisruhan yang terjadi di masyarakat. Dan kami dari Dinas ESDM melakukan upaya mencari jalan solusi untuk menutupi kekurangan sisa tahap pertama dan juga alhamdulillah mendapatkan kerjasama CSR dari beberapa perusahaan, sehingga pada bulan November 2021, semua sisa kekurangan tahap pertama dan di tambah tahap kedua sekitar 35 KK terselesaikan.

Berdasarkan penjelasan di atas tersebut, dapat dianalisa bahwa dalam pencapaian tujuan program ini, belum terlaksana secara efektif, dimana dari sisi proses pelaksanaan belum ada kepastian target standar waktu yang jelas dalam pencapaian tujuan, bergantung kepada kondisi keuangan dan terjadinya beberapa kali penundangan terhadap pendistribusian, yang seharusnya tahap pertama didistribusi berjumlah 75 KK, namun yang terealisasi hanya 20 KK pada saat peresmian oleh Gubernur, begitu juga yang diusulkan 192 KK dari Desa, yang terealisasi secara keseluruhan dari program ini tahap pertama ditambah tahap kedua hanya 110 KK.

## **2. Integrasi Komunikasi dalam Pelaksanaan Program Bantuan Subsidi Meteran Listrik Pasang Baru Per Rumah Tangga Dengan Daya 4 A (900va) Oleh Dinas ESDM Provinsi Kepri Di Desa Semembang**

Integrasi komunikasi merupakan kemampuan sebuah organisasi melibatkan proses penyatuan komunikasi dalam pencapaian tujuan sebuah program. Tujuan sebuah program Pemerintah itu menjawab permasalahan dan tuntutan yang ada di masyarakat. Begitu juga dengan tujuan masyarakat, terutama lansia dan masyarakat tidak mampu, untuk mendapatkan bantuan subsidi merupakan amanah undang-undang untuk meringankan beban hidup mereka dan Pemerintah wajib memenuhinya.

Desa Semembang sebagaimana dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Kepala Desa, menjelaskan bahwa “dalam upaya meringankan beban masyarakat di Desa kami yang rata-rata hamper 95 % mata pencaharian mereka adalah Nelayan tradisional, yang secara pemasukan penghasilan tidak tentu, bergantung pada cuaca, untuk itu kami dari Desa mengambil inisiatif dengan mengusulkan permohonan bantuan nama-nama keseluruhan jumlah penduduk rumah tangga Desa, lebih kurang 192 KK rumah tangga ke Gubernur Kepri

tembusan ke Dinas ESDM, agar menjadi pertimbangan untuk mendapatkan bantuan subsidi meteran listrik pasang baru per rumah tangga dengan daya 4 A (900va) dari Pemerintah Provinsi. Berkas tersebut, saya kirim kepada salah satu Pemuda Semembang yang berada di Tanjungpinang untuk diserahkan ke Dinas ESDM Prov Kepri”.

Penulis menelusuri Pemuda tersebut, menanyakan terkait kronologis bantuan, berikut kutipan hasil wawancara penulis, dijelaskannya bahwa”Pada tanggal 15 September 2021, Kepala Bidang ESDM Prov Kepri, menghubungi saya, bahwa Pemerintah Provinsi Kepri terkena imbas refocusing anggaran, dari total 192 KK permohonan yang saudara ajukan dari Desa, kami dapat upayakan sekitar 75 KK dulu, untuk sisanya, jika anggaran perubahan tahun ini tidak memungkinkan kita upayakan anggaran murni tahun 2022, begitu dia menjelaskan hasil komunikasi Dinas ESDM bersamanya.”Selanjutnya dijelaskannya, setelah mendapatkan informasi demikian, dia mencoba menanyakan kembali kepada Kabid tersebut, bagaimana untuk proses distribusi penyalurannya, apakah ini dilaksanakan dari Dinas ESDM langsung yang melaksanakan atau dari Pemerintah Desa yang menyalurkan ke Rumah Tangga, Kabid tersebut menjelaskan bahwa program ini sudah kami serahkan ke salah satu Biro Pelaksana, nanti pihak Biro tersebut yang menghubungi Kepala Desa disana ya”.

Berdasarkan penjelasan Kepala Bidang ini, Pemuda tersebut menyampaikan ke Kepala Desa, bahwa Desa Semembang mendapatkan bantuan subsidi meteran listrik pasang baru per rumah tangga dengan daya 4 A (900va) sekitar 75 KK dari Dinas ESDM Prov Kepri, Dinas melihat dari kondisi keuangan anggaran perubahan, untuk bantuan tersebut bertahap untuk eksekusi pelaksanaan nanti pihak Biro akan menghubungi Pak Kades, silakan nanti pak kades berkomunikasi untuk realisasi pelaksanaan untuk memprioritaskan nama-nama yang layak seperti lansia dan masyarakat tidak mampu.

Disisi lain, penulis menggali informasi kembali kepada Kepala Desa terkait bagaimana komunikasi dan koordinasi dari Biro dan juga Dinas ESDM dalam pelaksanaan program, dijelaskannya bahwa “saya mendapat kabar usulan program Desa Semembang di setujui dari Dinas ESDM dari seorang Pemuda Desa yang tinggal di Tanjungpinang, saya selaku Kepala Desa sangat bersyukur dan berterimakasih, karena masyarakat saya dapat terbantu walaupun belum sepenuhnya dapat tahap pertama, kalua tidak salah waktu itu 75 KK, dan ketika itu saya mengkroscek kembali data nama-nama yang saya dan pihak Desa usulkan untuk saya pertimbangkan dan prioritaskan terlebih dahulu pada tahap pertama, terutama lansia dan yang tidak mampu yang betul-betul layak menerima. Namun pada saat pelaksanaan dari pihak Biro dan Dinas ESDM Kepri tidak ada melakukan komunikasi ke saya. Sehingga data nama-nama usulan yang mau saya prioritaskan tidak masuk, mereka Biro melakukan pendataan menurut versi rekap data mereka dan membelakangi saya selaku Kepala Desa, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dan ketidakcocokan data, banyak warga saya yang tidak mampu dan lansia tidak masuk dalam daftar nama penerima, warga berbondong-bondong menanyakan ke saya dan menyalahkan saya.”

Pernyataan di atas, menjelaskan dalam pelaksanaan program terjadinya miskomunikasi antara pihak Biro pelaksana dengan pihak Desa, sehingga menimbulkan gesekan di tengah masyarakat Desa Semembang, dimana Kepala Desa tidak dilibatkan dalam verifikasi data oleh pihak Biro penyelenggara, sehingga nama-nama rumah tangga lansia dan tidak mampu yang dianggap layak untuk menerima untuk diprioritaskan oleh Desa tidak mendapatkan pada tahap pertama, namun banyak banyak nama-nama yang dianggap mampu secara ekonomi, malahan sebaliknya mendapatkan. Adapun perbedaan data nama kedua versi tersebut, dapat kita lihat pada table 1.1 di bawah ini:

**Tabel 1.1: Perbandingan Data Usulan Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Meteran Listrik Dari Desa Semembang dengan Data Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Meteran Listrik dari Biro Pelaksana**

Data Usulan Nama-Nama Dari Desa Semembang			Data Nama-Nama dari Biro Pelaksana		
NO	NAMA	KET	NO	NAMA	KET
1	2	3	1	2	3
1	JAMAAH	LANSIA/MISKIN	1	SUHAIMI	MISKIN

2	ABDUL MANAF	LANSIA/MISKIN	2	ADLAN	MISKIN
3	ZAINAL ABIDIN	LANSIA/MISKIN	3	ROSLAN	MISKIN
4	SY.CANTIK	LANSIA/MISKIN	4	SUKMIN	MISKIN
5	USMAN	LANSIA/MISKIN	5	HARIYANTI	MISKIN
6	PATIMA	LANSIA/MISKIN	6	ROSLI	MISKIN
7	RAJA DARE	LANSIA/MISKIN	7	PATIMAH	LANSIA/MISKIN
8	SOYAH	LANSIA/MISKIN	8	RAHMAN	LANSIA/MISKIN
9	ABDUL RAZAK	LANSIA/MISKIN	9	HELMI	MISKIN
10	AWANG	LANSIA/MISKIN	10	SAPAAT	MISKIN
11	SALMAH	LANSIA/MISKIN	11	M. SALEH	MISKIN
12	RUSNI	LANSIA/MISKIN	12	AGUS SUSANTO	MISKIN
13	M.YUSUF	LANSIA/MISKIN	13	M.YAKOP	MISKIN
14	SALMAH	LANSIA/MISKIN	14	M. ARIS	MISKIN
15	KADARIAH	LANSIA/MISKIN	15	EDI	MISKIN
16	SUHAIMI	LANSIA/MISKIN	16	ABDUL MANAF	LANSIA/MISKIN
17	MASRI	LANSIA/MISKIN	17	ISMARUDI	MISKIN
18	KAHAR	LANSIA/MISKIN	18	KAHAR	LANSIA/MISKIN
19	MUHAMMAD	LANSIA/MISKIN	19	HARIPIN	LANSIA/MISKIN
20	SABTU	LANSIA/MISKIN	20	SULAIMAN	MISKIN
21	NORDIN	LANSIA/MISKIN	21	DEDI SYAHPUTRA	MISKIN
22	ZAITUN	LANSIA/MISKIN	22	SALMAH	MISKIN
23	ROSLI	LANSIA/MISKIN	23	ASRI	MISKIN
24	SAMSUDIN	LANSIA/MISKIN	24	SOYAH	LANSIA/MISKIN
25	MOHD.ISA	LANSIA/MISKIN	25	MUHAMMAD AZMIL	MISKIN
26	PATIMAH KARIM	LANSIA/MISKIN	26	RAHMAT	MISKIN
27	SY.KINTAN	LANSIA/MISKIN	27	RUSLI	MISKIN
28	SUDIN	LANSIA/MISKIN	28	JAMILAH	MISKIN
29	ASIAH	LANSIA/MISKIN	29	ZAHID	MISKIN
30	SYARIF	LANSIA/MISKIN	30	MASRI	LANSIA/MISKIN
31	JARIAH	LANSIA/MISKIN	31	HAIRUL	MISKIN
32	SITI AMINAH	LANSIA/MISKIN	32	JAMAAH	LANSIA/MISKIN
33	LAM	LANSIA/MISKIN	33	RAJAB	MISKIN
34	AMAT	LANSIA/MISKIN	34	ABU KASIM	MISKIN
35	M.YAKOP	LANSIA/MISKIN	35	IRPAN	MISKIN
36	UMAR	LANSIA/MISKIN	36	MASDAR	MISKIN
37	AZMAN T	LANSIA/MISKIN	37	AZHARUDIN	MISKIN
38	AMINAH	LANSIA/MISKIN	38	KAMARUDIN	MISKIN
39	PATMAH	LANSIA/MISKIN	39	ISKANDAR	MISKIN
40	ZAINUN	LANSIA/MISKIN	40	JASRI	MISKIN
41	BIAH	LANSIA/MISKIN	41	RUSNI	LANSIA/MISKIN
42	INDRA KUSNADI	LANSIA/MISKIN	42	LELAWATI	MISKIN
43	KANIRA	LANSIA/MISKIN	43	HALIMUN	MISKIN
44	MUSTAFA	LANSIA/MISKIN	44	JUFRIZAL	MISKIN
45	SYAMSIAH	LANSIA/MISKIN	45	IRWANTO	MISKIN
46	HASNAH	LANSIA/MISKIN	46	RONI VARERA	MISKIN
47	ODAH	LANSIA/MISKIN	47	YAZID	MISKIN
48	BAKRI	LANSIA/MISKIN	48	IRWAN	MISKIN

49	IKRAM	LANSIA/MISKIN	49	SAIDINA	MISKIN
50	SEMAR	LANSIA/MISKIN	50	RIZAL	MISKIN
51	KURDI	LANSIA/MISKIN	51	AZMAN	MISKIN
52	TAIRAH	LANSIA/MISKIN	52	YUSAINI	MISKIN
53	DAYANG	LANSIA/MISKIN	53	MERRI	MISKIN
54	ZALEHA	LANSIA/MISKIN	54	SYAMSIAH	MISKIN
55	RAHMAN	MISKIN	55	HASAN	MISKIN
56	ZAHID	MISKIN	56	RASID	MISKIN
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KET</b>	<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
57	AMRONI	MISKIN	57	SYARIF	MISKIN
58	M. ARIS	MISKIN	58	FADLIZAL	MISKIN
59	ZAKARIA	MISKIN	59	HASNAH	LANSIA/MISKIN
60	RUSLI	MISKIN	60	EFENDI OKTAFIANTO	MISKIN
61	SUZAINI	MISKIN	61	JAIS	MISKIN
62	AGUS SUSANTO	MISKIN	62	R. JUMARI	MISKIN
63	RASID	MISKIN	63	SAID MUHAMAD	MISKIN
64	RAZALI	MISKIN	64	AZANAN	MISKIN
65	LIZAN	MISKIN	65	JAMILAH	MISKIN
66	HUSIN	MISKIN	66	S. ALI	MISKIN
67	RAHMAT	MISKIN	67	KURDI	MISKIN
68	AZANAN	MISKIN	68	TAIRAH	MISKIN
69	SEMAN	MISKIN	69	ASIAH	MISKIN
70	MERRI	MISKIN	70	HAFRIANDI	MISKIN
71	AHMAD	MISKIN	71	SUDIN	MISKIN
72	IRPAN	MISKIN	72	SAPRIZAL	MISKIN
73	ABU KASIM	MISKIN	73	MOHD. ISA	MISKIN
74	HAMDAN	MISKIN	74	JUMADI	MISKIN
75	ROSLAN	MISKIN	75	KADARIAH	MISKIN

Sumber: Kantor Desa Semembang, 2021

Dari table 1.1 di atas, terlihat bahwa adanya ketidaksesuaian data nama-nama dari yang di data dan diusulkan Desa dengan data versi rekapan dari Biro pelaksana, perbedaan tersebut disebabkan terjadinya miskomunikasi antara pihak Biro pelaksana dengan Kepala Desa, dalam hal ini seharusnya pihak Biro tersebut mendudukkan dan melakukan koordinasi dulu dengan Kepala Desa selalu pemegang wilayah, dari 75 KK yang dibantu Dinas ESDM Kepri untuk tahap pertama, siapa-siapa saja nama-nama yang mau Kepala Desa prioritaskan, karena dia yang mengetahui kondisi riil masyarakatnya.

Mendalami problem tersebut, penulis menanyakan kepada salah satu tokoh masyarakat yang dituakan di Desa Semembang, beliau menjelaskan bahwa “permasalahan yang terjadi itu sebenarnya hanya miskomunikasi, berdasarkan yang saya ketahui, karena waktu itu saya juga yang ikut menengahi dan menyelesaikan konflik terkait nama-nama calon penerima tahap pertama. Ceritanya begini, sebelum mendapat kabar bahwa Semembang ini mendapatkan bantuan, pihak Biro pernah datang melakukan survey, ingin menjumpai Kepala Desa, namun Kepala Desa waktu itu slow respon, karena Biro ini membawa nama salah satu partai, dan mengatakan bahwa semua warga Semembang akan mendapatkan bantuan meteran listrik dari salah satu Anggota DPRD Provinsi dapil Karimun. Sebab mengapa Kepala Desa slow respon, karena program ini dari Desa yang mengusulkan tanpa melibatkan DPRD tertentu. Bahasa tersebutpun pernah disampaikan salah satu pengurus partai di Desa ketika kampanye Pemilu DPRD dan Pilkada Kepala Daerah 2020 bahwa seluruh rumah tangga di Semembang akan mendapatkan bantuan meteran listrik gratis dari salah satu DPRD tersebut, dan bahasa kata gratis ini yang dipegang masyarakat. Selanjutnya Biro tersebut melakukan



komunikasi dan menjumpai pengurus partai yang ada di Semembang tersebut. Setelah mendapatkan informasi Semembang mendapatkan bantuan subsidi meteran listrik yang diusulkan Desa bersama salah seorang pemuda asal sini dari Dinas ESDM Kepri, pihak Biro diminta dari Dinas ESDM melaksanakan, biro ini datang kembali ke Semembang, langsung menjumpai pengurus partai tersebut, disinilah terjadi perekapan data ulang dari versi tim partai tersebut menyisipkan ke Biro, namun tidak ada berkomunikasi kembali ke Kepala Desa. Dan mereka menyampaikan ke masyarakat bahwa program ini bantuan dari salah satu DPRD, bukan dari usulan Desa. Disinilah awal cerita menimbulkan konflik di tengah masyarakat, sehingga saya membantu menengahi, karena konflik tidak hanya dari masyarakat, tetapi konflik yang terjadi, yakni dari tim pengurus partai itu sendiri, mereka sesame klaim. Kepala Desa tak mau tandatangani nama-nama dari versi mereka yang merekap, karena data tersebut mereka mendata, tanpa melibatkan Kepala Desa, namun mereka menggunakan salah satu polisi untuk menekan Kepala Desa. Masyarakat yang awalnya di prioritaskan Desa, banyak yang tidak ada namanya, disitulah saya membantu menengahi. Dan banyak dari nama-nama yang tidak masuk tersebut, termasuk saya, kami masuk mandiri dengan Biro yang lain dengan mencicil secara berangsur, asalkan rumah kami bisa menyala.

Kemudian penulis menanyakan bagaimana dengan pelaksanaan yang 75 KK tahap pertama itu, apakah terealisasi 100%, beliau kembali menjelaskan, bahwa ketika pas hari H1 besoknya Gubernur mau meresmikan, bantuan hanya bisa terealisasi 20 KK dari 75 KK tersebut, dikarenakan anggaran APBD belum cair informasi dari Biro waktu itu, sementara sebelum Gubernur meresmikan, meteran ini harus terpasang, disini muncul dilemma lagi, memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari para masyarakat kita. Namun alhamdulillah semua berjalan lancar.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dianalisa bahwa dalam pelaksanaan program ini, belum duduknya integrasi komunikasi dari pihak penyelenggara Dinas ESDM Provinsi Kepri, Biro dengan Pihak Desa, kemudian adanya penyisipan dari kepentingan pihak partai tertentu, sehingga menimbulkan ketidakefektifan dalam proses pelaksanaan program. Program ini bisa berjalan efektif, apabila dalam proses pelaksanaannya dari Dinas ESDM Provinsi Kepri memberikan wewenang sepenuhnya ke pihak Desa selaku pendistribusi dan penanggungjawab, jika masalah ini pada awalnya dilimpah ke Desa yang melaksanakan ke masyarakat, maka tingkat kemungkinan besar tingkat keefektifan akan terwujud, karena sejak awal memang program ini diusulkan dari Desa, setidaknya desa bisa menjelaskan ke masyarakat, bahwa ini bantuan dari Dinas ESDM bertahap, bagi yang belum mendapatkan tahap pertama, akan mendapatkan tahap kedua. Karena tidak adanya komunikasi yang jelas sehingga program ini menjadi tidak berjalan efektif sebagaimana mesti yang diharapkan.

### **3. Adaptasi Pelaksanaan Program Bantuan Subsidi Meteran Listrik Pasang Baru Per Rumah Tangga Dengan Daya 4 A (900va) Oleh Dinas ESDM Provinsi Kepri Di Desa Semembang**

Adaptasi merupakan kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan prosedur terkait pelaksanaan program. Berdasarkan penjelasan pada sub pembahasan sebelumnya, dikarenakan terjadinya miskomunikasi, antara Dinas ESDM, Biro dan Desa, sehingga menimbulkan ketidakjelasan prosedur pelaksanaan program, sehingga dalam proses melakukan adaptasi sedikit mengalami kesulitan. Pihak penyelenggaran dalam hal ini tidak membuat standar yang jelas terkait pelimpahan kewenangan hanya melalui komunikasi secara lisan, harusnya ada SOP yang jelas.

Proses adaptasi yang terjadi, ketika program ini mengalami kendala barulah pihak penyelenggara dalam hal ini Biro mencari Kepala Desa, mencari tokoh yang dituakan. Seharusnya sebelum pelaksanaan program dilaksanakan, pihak penyelenggara mendudukan betul komunikasi kepada Kepala Desa, tanpa membawa embel-embel pihak manapun, menyampaikan terkait tujuan program, karena Biro mendapatkan Amanah dari Dinas terkait, dan program ini merupakan program pemerintah, semua pihak harus melepaskan ego kepentingan individu, kelompok, semuanya harus netral. Jika proses

adaptasi demikian di laksanakan, maka kemungkinan besar tingkat keefektifan program tersebut akan terlaksana dengan sebaik mungkin, karena tercapainya sebuah efektivitas program tidak dilihat dari pencapaian tujuannya saja, tetapi mesti diukur dari sebuah proses dalam pelaksanaannya.

Pada prinsipnya masyarakat Semembang itu rata-rata masyarakatnya sangat well dan terbuka kepada siapapun dan pihak manapun, mereka akan menerima dengan lapang dada, jika pihak manapun yang akan melaksanakan sebuah urusan, namun mereka harus diberi penjelasan secara detail, begitupun juga jangan sampai suatu pihak manapun menjanjikan sebuah harapan yang tidak pasti ke mereka, maka akan ditagih oleh mereka.

Dalam program tersebut, ketika penulis melakukan observasi dan wawancara di lapangan dalam proses adaptasi yang dilakukan memang sedikit melanggar dari sisi standar operasional prosedur, dimana tidak ada kejelasan prosedur dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh penyelenggara, padahal jika program ini dilaksanakan dengan prosedur yang jelas, maka permasalahan yang terjadi tidak akan muncul, sehingga program ini akan berjalan efektif. Program ini tidak ada sosialisasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh penyelenggara. Penulis menilai berdasarkan kejadian yang terjadi, pelimpangan kewenangan secara prosedur kurang tepat, hanya berdasarkan komunikasi lisan, tanpa melalui surat dan standar yang jelas, jika memang program ini dari Dinas ESDM Provinsi Kepri, seharusnya Dinas tersebut turun ke lokasi menyampaikan ke Pihak Desa untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat, terkait program yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaan, pihak yang akan menyelenggara dan teknis pelaksanaan distribusi. Jika ada adaptasi dan prosedur demikian, maka kemungkinan besar program ini akan berjalan efektif 100%. Namun dikarenakan tidak adanya kejelasan tersebut sehingga program ini tidak berjalan dengan efektif.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas pelaksanaan program bantuan Program bantuan subsidi meteran listrik pasang baru per rumah tangga dengan daya 4 a (900va) Di Desa Semembang Kecamatan Durai oleh Dinas ESDM Provinsi Kepri belum terlaksana dan terealisasi dengan efektif, dimana dalam proses ketepatan tujuan program mengalami kendala waktu dan penundaan tujuan sasaran, tidak adanya integrasi komunikasi dan sosialisasi program yang jelas dan terukur, kemampuan pihak dalam melakukan adaptasi dan kejelasan prosedur yang melaksanakan belum terlaksana dengan baik dan efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hariningsih, I. S. (2021). *Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Di Era Pandemi (Studi Kasus Di Kecamatan Genteng Kota Surabaya)*. 1–4. <http://repository.untag-sby.ac.id/10033/>
- Irwandi, E. R. C. (2017). *Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung)*. 7 Nomor 2, 24.
- Mursanti, E., & Tumiwa, F. (2019). *Imprint Strategi Penyediaan Akses Listrik di Perdesaan dan Daerah Terpencil di Indonesia*. Institute.
- Tutdin, Z., Thahura, F., Sains, U., & Nyak, C. (2021). *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi di Kota Langsa*. 7, 156–164.
- Zakiah, N., Oktavia, L., Khairiyah, F., & Ilman, M. A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 97. <https://doi.org/10.20961/sp.v15i2.43501>

## REFERENCE

- Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Business, New York.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Barzel, Y., & Kiser, E. (2002). Taxation and Voting Rights in Medieval England and France. *Rationality and Society*, 14(4), 473–508. <https://papers.ssrn.com/abstract=2138391>
- Bates, R. H. (2014). *Markets and States in Tropical Africa: The Political Basis of Economic Policy* (First Edit). Berkeley: University of California Press.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1525/9780520958524>
- Bates, R. H. (2016). *Public Choice and Rural Development*.  
[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=7JHDCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA81&dq=Bates+RH.+Public+Choice+Processes.+In:+Public+Choice+and+Rural+Development.+New+York:+Routledge+%3B+2016.&ots=HH1RwR6s1&sig=JSWQ6LGDjpbJQaUGfWCvf9Uhi6M&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=7JHDCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA81&dq=Bates+RH.+Public+Choice+Processes.+In:+Public+Choice+and+Rural+Development.+New+York:+Routledge+%3B+2016.&ots=HH1RwR6s1&sig=JSWQ6LGDjpbJQaUGfWCvf9Uhi6M&redir_esc=y#v=onepage&q&f)
- Caporaso, J. A. (1996). The European Union and forms of state: Westphalian, regulatory or post-modern? *Journal of Common Market Studies*, 34(1).  
<https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1996.tb00559.x>
- Caporaso, J. A., & Levine, D. P. (1992). Theories of Political Economy. In *Theories of Political Economy*. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511840197>
- Coate, M. B. (2002). A test of political control of the bureaucracy: The case of mergers. *Economics and Politics*, 14(1). <https://doi.org/10.1111/1468-0343.00097>
- Coleman, J. L. (1992). *Risks and wrongs*. CUP Archive.
- Collins, E. (2007). Indonesia betrayed. In *Indonesia Betrayed*.  
<https://doi.org/10.1515/9780824862985>
- Della Porta, D., & Vanucci, A. (2017). *Corrupt exchanges: Actors, resources, and mechanisms of political corruption*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315080284>
- Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur. (2019). *Daftar Izin Usaha Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur*.
- Ditjen Minerba. (2017). *Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri 2018*.
- Etzioni-Halevy, E. (2002). Linkage deficits in transnational politics. In *International Political Science Review* (Vol. 23, Issue 2). <https://doi.org/10.1177/0192512102023002006>
- Fossati, D. (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. 38(2), 321–324. <https://doi.org/10.1355/cs38-2j>
- Grindle, M. S. (1998). *The new political economy positive economics and negative politics* (Vol. 304). World Bank Publications.  
[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=4BbfWrlK3rAC&oi=fnd&pg=PA3&dq=Grindle+\(1989\)&ots=PtgVHpy2bg&sig=-mL5HSEJfGGsC39KSQIK0uiz4eA&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Grindle+\(1989\)&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=4BbfWrlK3rAC&oi=fnd&pg=PA3&dq=Grindle+(1989)&ots=PtgVHpy2bg&sig=-mL5HSEJfGGsC39KSQIK0uiz4eA&redir_esc=y#v=onepage&q=Grindle+(1989)&f=false)
- Jacobson, G. C., & Kernell, S. (1982). Strategy and Choice in the 1982 Congressional Elections. *PS: Political Science & Politics*, 15(3).  
<https://doi.org/10.1017/S1049096500060479>
- Jacobson, G. J. (1983). Money in congressional elections. *Electoral Studies*, 2(2), 185.  
[https://doi.org/10.1016/0261-3794\(83\)90067-7](https://doi.org/10.1016/0261-3794(83)90067-7)
- Jatam. (2017). *Mewaspada Ijon Politik Pertambangan pada Pemilu Serentak 2017* (Vol. 01). <https://www.jatam.org/wp-content/uploads/2017/02/Lembar-Fakta-Nasional1.pdf>
- KPK. (2016). *Laporan Studi Potensi Benturan Kepentingan Dalam Pendanaan Pilkada*. <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Laporan-Pendanaan-Pilkada.pdf>
- KPK. (2018). *Laporan Tahunan KPK 2018 Direktorat Penelitian dan Pengembangan*. <https://www.kpk.go.id/images/Integrito/LampiranLaptah2019/LITBANG.pdf>
- Lappie, J., & Marschall, M. (2018). Place and participation in local elections. *Political*

- Geography*, 64, 33–42. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2018.02.003>
- Marino, O., Subagiyo, H., & Alamanda, R. (2013). *Masyarakat sipil mengawasi alam: Review izin Industri berbasis lahan*.
- Marschall, M., Shah, P., & Ruhil, A. (2011). The study of local elections. *PS - Political Science and Politics*, 44(1), 97–100. <https://doi.org/10.1017/S1049096510001940>
- Modus Ijon Politik*. (2018, Juni 20). *Harianmomentum.com*. Retrieved: <https://harianmomentum.com/read/9453/modus-ijon-politik>
- Olson, M. (2000). *Power and Prosperity - Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships*. New York, Basic Books.
- Praja, A. P. (2014, April 24). Potensi pajak hilang triliunan: KPK nilai buruk pengelolaan mineral dan batu bara. *Kompas*, 5.
- Risal, S., Johnles, J., Bajari, A., Pramudiana, I., & Padatu, B. (2021, September 14). *Natural Resources Under Vortex of Simultaneously Elections*. <https://doi.org/10.4108/EAI.3-6-2021.2310734>
- Risal, S., Paranoan, D., & Djaja, S. (2017). Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman. *EJournal Administrative Reform (JAR)*, 1(3), 516–530.
- Risal, S., Zauhar, S., Sarwono, S., & Hermawan, H. (2020). Impact of Decentralization in East Kalimantan Province on Mineral and Coal Mining Policy. *Journal of Public Administration Studies*, 005(01). <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.6>
- Sidel, J. T. (2014). Economic foundations of subnational authoritarianism: Insights and evidence from qualitative and quantitative research. *Democratization*, 21(1), 161–184. <https://doi.org/10.1080/13510347.2012.725725>
- Tilly, C. (2021). War making and state making as organized crime. In *Power and Inequality: Critical Readings for a New Era: Second Edition*. <https://doi.org/10.4324/9781315205021-8>
- Tim Peneliti Perludem. (2011). *Menata Kembali Pengaturan Pemilukada*. <http://perludem.org/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=208>
- Trounstine, J. (2009). All politics is local: The reemergence of the study of city politics. *Perspectives on Politics*, 7(3). <https://doi.org/10.1017/S1537592709990892>
- Vedi R. Hadiz. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: a Southeast Asia Perspective*. Stanford University Press.